
MEMAHAMI KONSEP DASAR KONSELING SOSIAL BUDAYA

¹Meza Hadevi, ²Syukri Amin

¹²Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Email: *mezahadevi1305@gmail.com, aminsyukri@umb.ac.id*

Abstract

Indonesia, as an archipelagic nation with a massive multicultural population and a highly complex cultural diversity (including race, ethnicity, religion, gender, and social class), places the practice of Guidance and Counseling (BK) under the demand to be culturally sensitive and responsive. This article presents the results of a Systematic Literature Review (SLR) that qualitatively analyzed several selected scientific journals to identify and examine the basic concepts of Sociocultural Counseling. The research findings are grouped into five essential themes: the establishment of Cross-Cultural Counseling as the "fourth force" in psychology; the standard Model of Tripartite Multicultural Competence (Awareness, Knowledge, and Skills); the urgency of Cultural Awareness as a prerequisite; the importance of understanding the value orientation of Indonesian collectivism; and the need to integrate Local Wisdom Counseling Models (such as Catur Murti Counseling and the Gus Dur approach). The in-depth discussion outlines that Sociocultural Counseling is a philosophy of practice that is essential to prevent misconceptions (e.g., cultural encapsulation) and directly determines the significance of the therapeutic alliance. It is concluded that comprehensive mastery of these competencies and contextual understanding of local values are mandatory for counselors in order to provide ethical, fair services and achieve the highest effectiveness amidst Indonesian pluralism.

Keyword: *Understanding, Concept, Counseling, Social, Culture*

Abstrak

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan populasi multikultural yang masif dan keragaman budaya yang sangat kompleks (mencakup ras, etnis, agama, gender, dan kelas sosial), menempatkan praktik Bimbingan dan Konseling (BK) di bawah tuntutan untuk menjadi peka dan responsif secara budaya. Artikel ini menyajikan hasil Tinjauan Literatur Sistematis (Systematic Literature Review/SLR) yang menganalisis secara kualitatif beberapa jurnal ilmiah terpilih untuk mengidentifikasi dan menelaah konsep-konsep dasar Konseling Sosial Budaya. Hasil penelitian dikelompokkan menjadi lima tema esensial: penetapan Konseling Lintas Budaya sebagai "kekuatan keempat" dalam ilmu psikologi; Model baku Kompetensi Multibudaya Tripartit (Kesadaran, Pengetahuan, dan Keterampilan); urgensi Kesadaran Budaya (Cultural Awareness) sebagai prasyarat; pentingnya memahami orientasi nilai kolektivisme Indonesia; dan kebutuhan untuk mengintegrasikan Model Konseling Kearifan Lokal (seperti Konseling Catur Murti dan pendekatan Gus Dur). Pembahasan mendalam menguraikan bahwa Konseling Sosial Budaya adalah sebuah filosofi praktik yang esensial untuk mencegah miskonsepsi (misalnya cultural encapsulation) dan secara langsung menentukan signifikansi aliansi terapeutik. Disimpulkan bahwa penguasaan komprehensif terhadap kompetensi ini dan pemahaman kontekstual terhadap nilai-nilai lokal adalah wajib bagi konselor agar dapat memberikan layanan yang etis, adil, dan mencapai efektivitas tertinggi di tengah pluralisme Indonesia.

Kata Kunci: *Memahami, Konsep, Konseling, Sosial, Budaya*

Pendahuluan

Pelayanan Bimbingan dan Konseling (BK) diakui sebagai salah satu layanan psikologis profesional yang bertujuan untuk memberikan bantuan dalam memfasilitasi perkembangan dan mengatasi kesulitan individu (Sa'idah & Annajih, 2024). Dalam konteks Indonesia, di mana budaya bukan sekadar latar belakang, melainkan sebuah variabel yang bersifat "long life" dan permanen, proses konseling tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor sosio-kultural klien (Gumilang, 2015). Budaya secara fundamental membentuk worldview seseorang: bagaimana ia mendefinisikan masalah, bagaimana ia mencari bantuan, hingga ekspektasinya terhadap konselor (Mulyani et al., 2022). Krisis dalam praktik konseling muncul ketika teori-teori baku yang dikembangkan di Barat (yang umumnya berlandaskan pada nilai individualisme dan otonomi pribadi) diterapkan secara mentah-mentah pada klien Indonesia yang cenderung kolektifis (menghargai harmoni, gotong royong, dan keputusan kelompok). Pendekatan yang tidak sensitif budaya ini berpotensi menyebabkan miskonsepsi nilai budaya (cultural bias) dan bahkan menjadi hambatan signifikan dalam membangun aliansi terapeutik (Diniaty, 2018). Sebagai respons terhadap keterbatasan ini, Konseling Sosial Budaya (atau Konseling Lintas Budaya) muncul sebagai "kekuatan keempat" dalam bidang psikologi, menuntut agar konselor secara eksplisit dan proaktif mengintegrasikan dimensi budaya ke dalam setiap tahapan layanan (Widodo et al., 2022).

Meskipun urgensi Konseling Sosial Budaya telah banyak diakui dalam berbagai forum akademik maupun praktik profesional, realitas di lapangan masih menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara idealisme konseptual dan pelaksanaannya. (Syamaun, 2019) Secara teoritis, konseling berbasis kesadaran budaya menuntut konselor untuk memiliki sensitivitas terhadap nilai-nilai, norma, dan sistem kepercayaan yang dianut oleh konseli dari berbagai latar belakang sosial dan etnis. Namun, dalam praktiknya, banyak konselor di Indonesia yang masih belum sepenuhnya menginternalisasi pentingnya kompetensi budaya tersebut. Hal ini dapat terlihat dari pendekatan konseling yang sering kali bersifat seragam, tanpa mempertimbangkan perbedaan latar belakang sosial, agama, bahasa, atau tradisi yang memengaruhi cara konseli memaknai masalah yang dihadapi. Kurangnya pelatihan dan refleksi diri dalam aspek kesadaran budaya menjadikan layanan konseling kurang relevan dengan konteks kehidupan konseli. Akibatnya, proses konseling kehilangan makna dialogis yang sejatinya menjadi ruh dari praktik konseling itu sendiri yakni membangun hubungan empatik dan saling memahami antara konselor dan konseli. (Prasetyo, 2021)

Dengan demikian, peran lembaga pendidikan, asosiasi profesi, dan institusi layanan menjadi sangat krusial dalam memperkuat kapasitas konselor agar memiliki kompetensi sosial budaya yang memadai. Lembaga pendidikan tinggi perlu merancang kurikulum yang tidak hanya menekankan aspek teoritis dan teknis konseling, tetapi juga membekali calon konselor dengan pengalaman reflektif dan praktik lintas budaya. Melalui pelatihan yang berorientasi pada kesadaran diri, pemahaman nilai-nilai lokal, serta penghargaan terhadap keberagaman sosial, konselor akan mampu mengembangkan kepekaan yang lebih mendalam terhadap realitas kultural masyarakat Indonesia. Asosiasi profesi juga berperan penting dalam membangun sistem sertifikasi dan supervisi yang menekankan etika serta kompetensi budaya sebagai indikator profesionalitas. Sementara itu, institusi layanan diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung praktik konseling inklusif, dengan memberikan ruang bagi inovasi pendekatan yang kontekstual dan berbasis pada kebutuhan

masyarakat. Melalui sinergi ketiga elemen tersebut, diharapkan kesenjangan antara idealisme dan implementasi praktis dalam konseling sosial budaya dapat teratasi. Konseling di Indonesia pun dapat berkembang menjadi sarana pemulihan yang tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga menumbuhkan keharmonisan sosial, menghargai keragaman, serta memperkuat kesejahteraan psikososial masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan. (Mulyani et al., 2022)

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan utama untuk melakukan tinjauan literatur sistematis yang mendalam dalam rangka mengidentifikasi, menganalisis, dan mensintesis berbagai konsep inti yang berkaitan dengan Konseling Sosial Budaya. Melalui pendekatan sistematis ini, penelitian berupaya menelusuri sejauh mana teori, prinsip, dan praktik Konseling Sosial Budaya telah dikembangkan dan diterapkan, khususnya dalam konteks masyarakat yang majemuk seperti Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti model baku Kompetensi Multibudaya Tripartit sebagai standar wajib yang harus dimiliki oleh konselor profesional. Model ini mencakup tiga dimensi utama, yakni kesadaran diri terhadap bias budaya pribadi, pengetahuan tentang keragaman budaya, serta keterampilan dalam menerapkan pendekatan yang sensitif terhadap latar belakang budaya konseli. (Sutarto, 2022) Dengan memahami dan menguasai ketiga aspek tersebut, konselor diharapkan mampu memberikan layanan yang lebih efektif, empatik, dan relevan dengan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia. Lebih jauh lagi, penelitian ini menguraikan implikasi praktis dari integrasi kearifan lokal dalam praktik konseling sebagai strategi lokalisasi intervensi. Kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial di setiap daerah di Indonesia dipandang sebagai sumber daya budaya yang dapat memperkaya proses konseling. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan paradigma konseling yang berbasis budaya, inklusif, serta selaras dengan karakter dan kebutuhan masyarakat Indonesia. (Qadam, 2019)

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Studi Pustaka (*Library Research*) dengan jenis Tinjauan Literatur Sistematis (*Systematic Literature Review/SLR*). (Salsabila et al., 2019) Metode SLR dipilih untuk memberikan kerangka kerja yang rigor, transparan, dan komprehensif dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis literatur ilmiah yang relevan guna membangun pemahaman konseptual yang kokoh mengenai konsep dasar Konseling Sosial Budaya (H. Putri et al., 2024). Sumber data primer yang digunakan adalah Dokumen-dokumen ilmiah terpilih yang dicari menggunakan kombinasi kata kunci seperti "Konseling Sosial Budaya", "Konseling Multibudaya", "Kompetensi Lintas Budaya Konselor", dan "Kearifan Lokal Konseling", dengan fokus utama pada konteks Indonesia. Pencarian difokuskan pada basis data akademik, dengan kriteria inklusi jurnal yang berfokus pada Bimbingan dan Konseling di Indonesia, membahas konsep budaya, dan merupakan hasil kajian konseptual, studi kasus, atau penelitian kualitatif/deskriptif. (Asdaliah & Mahmud, 2022)

Data yang diekstrak dari beberapa dokumen atau artikel tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui tahapan analisis tematik. Prosedur ini dimulai dengan ekstraksi data kunci (mencakup definisi, pilar kompetensi, fenomena bias, dan model kearifan lokal), dilanjutkan dengan Kategorisasi Tematik (*Thematic Coding*), yang melibatkan open coding dan axial coding untuk mengelompokkan konsep-konsep menjadi lima kategori tematik

sentral. Tahap akhir adalah Sintesis Konseptual dan Interpretasi, di mana kelima tema dihubungkan dan diinterpretasikan untuk menyusun argumen yang koheren, mengidentifikasi hubungan sebab-akibat, dan menyajikan model konseptual yang relevan dengan konteks pluralisme Indonesia.

Hasil Dan Pembahasan

A. Konseling Lintas Budaya: Kekuatan Keempat dan Imperatif Keadilan Sosial

Literatur secara konsisten menegaskan bahwa Konseling Lintas Budaya telah memperoleh pengakuan yang luas sebagai paradigma sentral atau yang sering disebut sebagai *the fourth force* (kekuatan keempat) dalam bidang psikologi, setelah psikoanalisis, behaviorisme, dan humanistik. Status ini tidak hanya bersifat simbolis, melainkan mencerminkan transformasi mendasar dalam cara para ahli memahami manusia dan proses konseling. Dalam paradigma sebelumnya, pendekatan psikologi cenderung bersifat universalistik, yaitu mengasumsikan bahwa prinsip-prinsip psikologis dapat diterapkan secara umum tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan budaya individu. Namun, paradigma Konseling Lintas Budaya menghadirkan perspektif kontekstualistik, yang menegaskan bahwa setiap individu senantiasa dibentuk oleh lingkungan sosial, budaya, ras, etnis, agama, bahasa, serta nilai-nilai yang melingkupinya. Pergeseran ini menuntut perubahan paradigma dalam praktik konseling. Konselor tidak lagi dapat memandang klien hanya sebagai entitas psikologis yang netral, melainkan sebagai pribadi yang membawa identitas budaya yang kompleks.

Dengan demikian, proses konseling harus secara proaktif dan eksplisit melibatkan variabel-variabel budaya tersebut dalam seluruh tahapan intervensi, mulai dari asesmen, formulasi masalah, hingga pemilihan teknik dan pendekatan terapeutik. Hal ini bertujuan untuk mencegah bias budaya yang mungkin muncul akibat dominasi perspektif barat dalam teori dan praktik konseling konvensional. Lebih jauh lagi, paradigma ini menempatkan kesadaran budaya (*cultural awareness*) dan kompetensi multibudaya (*multicultural competence*) sebagai komponen utama dalam profesionalisme seorang konselor. Konselor diharapkan memiliki pemahaman mendalam terhadap latar belakang budaya klien, termasuk sistem nilai, tradisi, dan makna spiritual yang menjadi dasar perilaku dan cara pandang mereka terhadap kehidupan. Kesadaran semacam ini memungkinkan terjadinya hubungan terapeutik yang lebih empatik, saling menghormati, dan bermakna. Dalam konteks Indonesia yang dikenal dengan keberagaman suku, agama, bahasa, dan adat istiadat, relevansi paradigma Konseling Lintas Budaya menjadi semakin kuat. Konseling tidak dapat dipisahkan dari dimensi sosial dan kultural yang memengaruhi cara individu memahami masalah dan mencari solusi. Dengan demikian, konselor perlu mengembangkan pendekatan yang berbasis lokal dan berorientasi pada nilai-nilai kearifan budaya masyarakat setempat. Pendekatan inilah yang memungkinkan konseling menjadi lebih adaptif, inklusif, dan berdaya guna dalam memperkuat kesejahteraan psikososial masyarakat yang majemuk. (S. K. Putri, 2020).

Penetapan Konseling Lintas Budaya sebagai *kekuatan keempat* dalam psikologi menandakan bahwa layanan Bimbingan dan Konseling (BK) tidak lagi dapat dipandang sekadar sebagai intervensi individual yang bersifat netral budaya. Sebaliknya, layanan BK harus diposisikan sebagai layanan yang berorientasi pada keadilan sosial (*social justice*) suatu pendekatan yang menempatkan nilai kesetaraan, penghormatan terhadap keragaman, dan pemberdayaan individu serta komunitas sebagai inti dari praktik konseling. Perspektif ini menuntut konselor untuk tidak hanya memahami klien dari sisi intrapsikis atau perilaku, tetapi juga menyadari pengaruh struktur sosial, diskriminasi,

marginalisasi, dan ketimpangan budaya yang mungkin dialami oleh klien. Dalam konteks ini, kegagalan konselor untuk mengakomodasi budaya klien tidak dapat dianggap sebagai kesalahan teknis semata. Hal tersebut mencerminkan bentuk ketidakadilan struktural yang bersumber dari bias budaya dan etnosentrisme dalam praktik konseling. Ketika konselor menggunakan standar nilai atau interpretasi masalah berdasarkan perspektif budaya pribadinya tanpa mempertimbangkan latar belakang budaya klien, maka proses konseling menjadi tidak efektif karena kehilangan relevansi dan empati yang seharusnya menjadi fondasi hubungan terapeutik. Lebih jauh lagi, kegagalan ini juga bersifat tidak etis, sebab ia mengabaikan realitas eksistensial klien — yaitu hak klien untuk dipahami dan dihormati sebagai individu yang memiliki nilai, makna hidup, dan sistem kepercayaan yang unik.

B. Model Kompetensi Multibudaya Tripartit: Fondasi Etis dan Pencegahan Miskonsepsi

Terdapat konsensus yang kuat di kalangan para ahli bahwa model baku Kompetensi Multibudaya Tripartit yang dikembangkan oleh Derald Wing Sue merupakan standar praktik minimal yang wajib dimiliki oleh setiap konselor profesional dalam memberikan layanan yang sensitif terhadap keragaman budaya. Model ini menjadi fondasi utama dalam praktik konseling lintas budaya karena menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek personal, kognitif, dan praktikal dalam memahami serta menangani klien dari berbagai latar belakang sosial dan kultural. Kompetensi Multibudaya Tripartit terdiri dari tiga dimensi krusial, yaitu Kesadaran Diri (*Awareness*), Pengetahuan Budaya (*Knowledge*), dan Keterampilan Intervensi (*Skills*). Pertama, Kesadaran Diri mengacu pada kemampuan konselor untuk secara reflektif memahami nilai-nilai, keyakinan, serta bias budaya yang dimilikinya sendiri. Konselor dituntut untuk menyadari bagaimana latar belakang pribadinya dapat memengaruhi persepsi terhadap klien dan dinamika hubungan terapeutik. Dengan memiliki kesadaran ini, konselor dapat menghindari kecenderungan untuk menilai atau menginterpretasikan perilaku klien berdasarkan standar budaya pribadi, sehingga tercipta ruang konseling yang lebih netral, empatik, dan inklusif.

Kedua, Pengetahuan Budaya menuntut konselor untuk memahami secara mendalam sistem nilai, tradisi, bahasa, serta struktur sosial dari berbagai kelompok budaya yang mungkin dihadapi dalam praktiknya. Pengetahuan ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga kontekstual — mencakup kesadaran terhadap faktor-faktor sejarah, ekonomi, dan politik yang memengaruhi kehidupan kelompok tertentu. Dengan memahami keragaman ini, konselor dapat lebih tepat dalam menafsirkan perilaku, keyakinan, serta pola komunikasi klien sesuai dengan konteks budayanya. Ketiga, Keterampilan Intervensi menekankan kemampuan konselor untuk menerapkan strategi konseling yang adaptif terhadap kebutuhan budaya klien. Ini mencakup kemampuan memilih metode, teknik, dan pendekatan yang sesuai dengan nilai serta preferensi klien, termasuk kemampuan menggunakan simbol, bahasa, dan praktik budaya lokal sebagai bagian dari proses terapeutik. Keterampilan ini juga mencakup sensitivitas dalam membangun hubungan konseling yang setara dan kolaboratif, di mana klien merasa dihargai sebagai individu yang kompeten dalam menentukan arah pemulihannya. Secara keseluruhan, penerapan model Kompetensi Multibudaya Tripartit memastikan bahwa praktik konseling tidak bersifat bias, eksklusif, atau terpusat pada budaya dominan. Sebaliknya, ia mendorong terciptanya layanan yang berkeadilan, humanis, dan relevan dengan realitas masyarakat yang multikultural. Bagi konteks Indonesia yang sangat beragam, model ini menjadi panduan penting dalam membangun konseling yang menghargai perbedaan sekaligus memperkuat harmoni

sosial.(Sona, 2016). Kesadaran Budaya (Cultural Awareness) diidentifikasi sebagai dimensi yang paling fundamental dan merupakan prasyarat krusial yang paling mendasar (H. Putri et al., 2024).

Kekurangan dalam dimensi kompetensi multibudaya, khususnya dalam hal kesadaran diri dan pemahaman lintas budaya, memiliki implikasi yang serius terhadap kualitas layanan konseling. Ketidakseimbangan dalam penguasaan kompetensi ini sering kali berujung pada munculnya fenomena miskonsepsi nilai budaya, yang dapat menghambat efektivitas hubungan konselor dan klien. Dua bentuk miskonsepsi yang paling umum terjadi adalah cultural encapsulation dan overculturalizing, yang masing-masing merepresentasikan ekstrem dari kegagalan konselor dalam memahami dinamika budaya secara tepat. Fenomena cultural encapsulation terjadi ketika konselor terkurung dalam sistem nilai dan norma budayanya sendiri, sehingga ia menilai perilaku atau permasalahan klien berdasarkan standar budayanya tanpa mempertimbangkan konteks budaya klien. Dalam kondisi ini, konselor cenderung mengasumsikan bahwa apa yang benar, baik, atau wajar menurut budayanya juga berlaku universal bagi semua individu. Akibatnya, proses konseling kehilangan dimensi empatik dan dialogis, karena konselor gagal melihat makna subjektif yang dimiliki klien terhadap pengalaman hidupnya. Sikap seperti ini dapat memunculkan jarak emosional dan mengurangi kepercayaan klien terhadap konselor.

Sebaliknya, fenomena overculturalizing muncul ketika konselor terlalu menekankan faktor budaya dalam memahami permasalahan klien, sehingga semua persoalan dianggap semata-mata berasal dari budaya. Perspektif ini juga problematis karena mengabaikan faktor-faktor lain seperti kondisi psikologis, ekonomi, keluarga, atau pengalaman traumatis yang mungkin turut memengaruhi masalah klien. Dengan demikian, pendekatan yang terlalu menonjolkan budaya justru berpotensi menyederhanakan kompleksitas kehidupan manusia dan menghambat pemahaman yang holistik terhadap situasi klien. Kedua fenomena tersebut menunjukkan pentingnya keseimbangan dalam penerapan kompetensi multibudaya. Konselor perlu mengembangkan refleksi diri yang kritis terhadap nilai-nilai budayanya sendiri, sembari tetap terbuka dan peka terhadap budaya orang lain tanpa jatuh pada generalisasi berlebihan. Dengan menghindari jebakan cultural encapsulation dan overculturalizing, konselor dapat menjalankan perannya secara profesional — yaitu membantu klien memahami dirinya dalam konteks sosial-budaya secara utuh, tanpa menghapus identitas kulturalnya maupun mereduksi kompleksitas masalah yang dihadapinya.(Diniaty, 2018).

C. Kontekstualisasi dan Lokalisasi Praktik Melalui Kearifan Lokal

Literatur di Indonesia secara tegas menekankan pentingnya bagi konselor untuk memahami orientasi nilai budaya Indonesia yang secara dominan bercorak kolektivisme dan orientasi vertikal. Dua karakter utama ini menjadi fondasi dalam memahami perilaku, relasi sosial, serta pola komunikasi masyarakat Indonesia. Dalam budaya kolektivis, kepentingan kelompok atau komunitas sering kali ditempatkan di atas kepentingan individu. Nilai seperti kebersamaan, gotong royong, harmoni sosial, dan penghormatan terhadap orang lain menjadi pedoman utama dalam interaksi sosial. Sementara itu, orientasi vertikal menegaskan adanya struktur hierarki sosial yang kuat baik dalam keluarga, lembaga, maupun masyarakat luas di mana penghormatan terhadap otoritas, usia, dan status sosial dianggap sebagai bagian dari etika dan keseimbangan sosial. Bagi seorang konselor, pemahaman terhadap dua orientasi nilai ini sangat krusial agar dapat menafsirkan perilaku klien secara tepat dan kontekstual. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi harmoni sosial, misalnya,

individu cenderung menekan emosi atau menghindari konfrontasi langsung demi menjaga hubungan baik. Tanpa pemahaman terhadap norma ini, konselor bisa saja menilai klien sebagai pasif, tidak asertif, atau kurang terbuka, padahal perilaku tersebut merupakan bentuk kepatuhan terhadap nilai sosial yang berlaku. Demikian pula, dalam budaya yang hierarkis, konselor harus mampu menempatkan diri dengan menghormati nilai sopan santun dan struktur sosial yang diakui oleh klien, agar hubungan terapeutik dapat terjalin dengan rasa saling percaya dan nyaman.

Sebagai respons terhadap kebutuhan lokalisasi teori, berbagai model konseling kontekstual khas Indonesia telah dikembangkan. Salah satunya adalah Model Konseling Catur Murti, yang berakar pada filsafat keseimbangan antara empat aspek utama kehidupan manusia: cipta, rasa, karsa, dan karya. Model ini menekankan pentingnya harmoni antara aspek rasional, emosional, spiritual, dan tindakan sosial dalam proses konseling. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan budaya Indonesia yang menilai keseimbangan batin dan sosial sebagai kunci kebahagiaan serta kesehatan psikologis. Selain itu, dikenal pula pendekatan Konseling Lintas Budaya Gus Dur, yang mengintegrasikan nilai-nilai agama, kemanusiaan, dan kearifan lokal sebagai dasar etis dan praktis dalam pelayanan konseling. Pendekatan ini mencerminkan semangat pluralisme dan penghargaan terhadap perbedaan yang telah lama menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Dengan mengedepankan nilai-nilai seperti toleransi, empati, dan kesetaraan, model ini tidak hanya memulihkan individu dari permasalahan pribadi, tetapi juga memperkuat tatanan sosial yang inklusif dan harmonis. Dengan demikian, literatur Indonesia menggarisbawahi bahwa efektivitas konseling tidak dapat dilepaskan dari konteks budaya lokal. Upaya lokalisasi teori melalui model seperti Catur Murti dan pendekatan Gus Dur menjadi bukti nyata bahwa konseling di Indonesia harus berakar pada nilai-nilai budaya bangsa sendiri — bukan sekadar adaptasi dari teori Barat, tetapi transformasi yang selaras dengan jiwa kemanusiaan dan kebijaksanaan lokal Nusantara. (Firjatullah & Sa, 2025) (El et al., 2023).

Tuntutan untuk menguasai Keterampilan Intervensi secara efektif dalam konseling, khususnya dalam konteks budaya yang beragam seperti Indonesia, hanya dapat dipenuhi melalui kontekstualisasi dan lokalisasi teori konseling yang ada. Ini berarti bahwa teori-teori konseling yang berasal dari tradisi Barat, meskipun memiliki nilai universal, perlu disesuaikan agar relevan dengan kondisi sosial, budaya, dan kearifan lokal yang ada di Indonesia. Kontekstualisasi ini mengharuskan konselor untuk memahami dengan mendalam latar belakang budaya klien, termasuk nilai-nilai, tradisi, dan norma sosial yang berlaku dalam kehidupan mereka. Di Indonesia, yang memiliki budaya kolektivistis yang kuat, nilai-nilai seperti Gotong Royong dan sikap Kekeluargaan sangat mendominasi interaksi sosial. Dalam masyarakat kolektivistis, kebutuhan dan kesejahteraan kelompok lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Konsep gotong royong (kerja sama) dan sikap kekeluargaan mencerminkan solidaritas dan kebersamaan yang menjadi dasar hubungan antarindividu, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun lingkungan kerja. Oleh karena itu, dalam memberikan intervensi, konselor harus mampu menyesuaikan pendekatannya agar sejalan dengan nilai-nilai kolektivistis ini.

Misalnya, dalam konseling keluarga atau konseling kelompok, pendekatan yang terlalu individualistik mungkin tidak akan efektif, karena dalam budaya kolektivistis, masalah sering kali dilihat sebagai masalah bersama yang harus diselesaikan secara kolektif. Konselor perlu menyesuaikan

teknik dan strategi konseling untuk mengakomodasi dinamika kelompok dan menjaga keharmonisan dalam interaksi antaranggota keluarga atau komunitas. Dalam kasus ini, keterampilan intervensi yang efektif melibatkan pemahaman tentang cara membangun komunikasi yang inklusif dan mengedepankan nilai-nilai solidaritas serta kerja sama dalam mencari solusi. Selain itu, dalam budaya kekeluargaan, yang sangat menekankan ikatan emosional yang erat, konselor harus mengakui peran keluarga sebagai sumber utama dukungan emosional. Oleh karena itu, pendekatan yang bersifat lebih kolaboratif dan partisipatif sering kali lebih efektif daripada pendekatan yang terlalu fokus pada individu. Konselor perlu melibatkan keluarga atau komunitas dalam proses konseling, untuk memperkuat rasa saling memiliki dan mendukung, yang merupakan bagian integral dari budaya gotong royong. Lebih lanjut, kesadaran terhadap nilai-nilai budaya seperti gotong royong dan kekeluargaan juga mengarah pada penghargaan terhadap hubungan interpersonal yang dekat dan empatik. Konselor harus mengembangkan keterampilan interpersonal yang sensitif budaya, yang melibatkan kemampuan untuk berkomunikasi secara terbuka, menghargai pendapat orang lain, serta menciptakan iklim yang mendukung dan mengedepankan kepentingan bersama.

Hal ini memastikan bahwa proses konseling tidak hanya memberikan bantuan individual, tetapi juga memperkuat jaringan sosial yang mendukung proses perubahan klien. Dengan kata lain, keberhasilan keterampilan intervensi dalam konseling di Indonesia sangat bergantung pada sejauh mana konselor dapat mengintegrasikan dan mengadaptasi teori-teori konseling sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal. Dalam konteks budaya kolektif Indonesia, konselor yang sukses adalah mereka yang mampu berempati dengan nilai gotong royong dan kekeluargaan, serta mengimplementasikan pendekatan yang menghormati dinamika sosial budaya tersebut. (Syahril, 2007). Intervensi yang berhasil dalam konteks konseling di Indonesia sering kali melibatkan pendekatan yang lebih holistik dan kontekstual, seperti konseling keluarga atau konsultasi dengan figur otoritas, karena faktor sosial dan budaya yang kental dalam kehidupan masyarakat. Dalam budaya kolektif, keluarga dan komunitas sering kali menjadi sumber utama dukungan dan penyelesaian masalah. Oleh karena itu, mengabaikan peran keluarga atau tokoh-tokoh penting dalam lingkungan sosial klien dapat mengurangi efektivitas intervensi. Konselor yang berfokus hanya pada individu tanpa memperhitungkan dinamika keluarga atau komunitas sering kali menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan masalah yang bersifat sistemik dan berkaitan dengan interaksi sosial.

Dalam konteks ini, konseling keluarga menjadi sangat relevan, karena banyak masalah psikologis atau sosial yang muncul dalam konteks hubungan interpersonal dalam keluarga. Misalnya, masalah komunikasi, ketegangan antar anggota keluarga, atau peran sosial dalam keluarga, semuanya dapat berkontribusi pada kesejahteraan emosional klien. Dengan mengikutsertakan keluarga dalam proses konseling, konselor dapat membantu menciptakan solusi yang lebih komprehensif, di mana setiap anggota keluarga merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam proses penyembuhan atau perbaikan. Selain itu, konsultasi dengan figur otoritas juga merupakan bagian dari pendekatan yang tidak bisa diabaikan dalam budaya Indonesia. Tokoh-tokoh yang dihormati dalam komunitas, seperti kepala desa, ulama, guru, atau tokoh masyarakat lainnya, sering kali memainkan peran penting dalam membentuk persepsi klien terhadap masalah yang dihadapi. Dalam banyak kasus, keterlibatan mereka dalam proses konseling dapat memberikan legitimasi sosial dan memperkuat proses

perubahan yang diinginkan. Dalam budaya yang menghargai hierarki dan otoritas, nasihat atau bimbingan dari figur-figur ini bisa memperkuat efektivitas intervensi.

Model-model konseling yang berakar di Indonesia, seperti Konseling Catur Murti, menawarkan pendekatan yang sangat sesuai dengan pandangan dunia lokal yang mengedepankan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan. Model Catur Murti menekankan pentingnya harmonisasi empat aspek, yaitu spiritual, intelektual, emosional, dan fisik dalam kehidupan manusia. Pendekatan ini sangat relevan dengan nilai-nilai lokal yang menekankan keseimbangan dan keselarasan, bukan hanya pada satu dimensi saja, tetapi pada keseluruhan aspek kehidupan. Dengan menyeimbangkan aspek-aspek ini, model ini dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapi klien secara lebih holistik dan menyeluruh. Misalnya, dalam aspek spiritual, konseling Catur Murti menghargai peran agama atau kepercayaan sebagai sumber kekuatan batin dan petunjuk hidup, yang banyak dihormati dalam masyarakat Indonesia. Aspek intelektual merujuk pada pengembangan pikiran dan pengetahuan, yang memungkinkan klien untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang masalah yang dihadapi. Aspek emosional berfokus pada pengelolaan perasaan dan hubungan interpersonal, sementara aspek fisik mengingatkan pentingnya kesehatan tubuh dalam menjaga keseimbangan psikologis. Melalui pendekatan yang menggabungkan empat aspek ini, model Catur Murti memberikan kerangka kerja yang sangat cocok dengan pandangan dunia lokal yang menekankan keseimbangan antara tubuh, pikiran, jiwa, dan hubungan sosial. Dengan demikian, intervensi yang berhasil dalam konteks konseling di Indonesia tidak hanya mengandalkan teknik-teknik psikologis, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai budaya yang berakar kuat dalam masyarakat. Konseling yang melibatkan keluarga, konsultasi dengan figur otoritas, serta penerapan model-model yang sudah intrinsik dengan pandangan dunia lokal seperti Konseling Catur Murti, memberikan solusi yang lebih holistik dan sesuai dengan kebutuhan klien dalam konteks sosial dan budaya yang lebih luas. (Firjatullah & Sa, 2025).

D. Pemahaman Budaya dan Korelasi Signifikan terhadap Aliansi Terapeutik

Temuan penelitian yang ada menunjukkan adanya korelasi yang sangat signifikan antara tingkat pemahaman budaya konselor dengan keberlangsungan dan efektivitas layanan konseling. Pemahaman budaya yang baik oleh seorang konselor tidak hanya meningkatkan kualitas hubungan terapeutik, tetapi juga memainkan peran kunci dalam keberhasilan proses konseling itu sendiri. Dalam konteks konseling lintas budaya, di mana klien berasal dari latar belakang sosial, etnis, atau agama yang berbeda, kemampuan konselor untuk memahami dan menghargai nilai-nilai, norma, dan tradisi yang membentuk pandangan hidup klien menjadi sangat penting. Salah satu aspek yang paling menonjol dalam temuan ini adalah bagaimana pemahaman budaya konselor secara langsung mempengaruhi keberlangsungan layanan konseling. Konselor yang tidak memiliki kesadaran budaya yang cukup sering kali menghadapi tantangan dalam membangun hubungan yang empatik dan terpercaya dengan klien. Ketidakkampuan konselor untuk mengenali perbedaan nilai budaya dapat menyebabkan kesalahpahaman, ketegangan, atau bahkan penolakan klien terhadap proses konseling itu sendiri. Dalam banyak kasus, klien mungkin merasa bahwa konselor tidak memahami atau menghargai latar belakang budaya mereka, yang dapat menyebabkan keretakan dalam hubungan terapeutik. Akibatnya, layanan konseling menjadi tidak efektif dan berisiko berakhir sebelum mencapai tujuannya.

Sebaliknya, konselor yang memiliki pemahaman budaya yang baik mampu menyesuaikan pendekatannya dengan lebih baik sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang dianut oleh klien. Pemahaman ini memungkinkan konselor untuk lebih fleksibel dalam memilih teknik konseling yang lebih tepat, lebih sensitif terhadap perbedaan budaya, dan lebih relevan dengan konteks kehidupan klien. Sebagai contoh, konselor yang memahami pentingnya nilai gotong royong atau kekeluargaan dalam budaya Indonesia akan lebih mudah melibatkan anggota keluarga dalam proses konseling, yang merupakan strategi efektif dalam banyak kasus, terutama dalam budaya kolektivistik. Hal ini membuat klien merasa lebih dihargai dan lebih terbuka dalam berbagi masalah mereka. Selain memengaruhi keberlangsungan layanan, pemahaman budaya konselor juga sangat berhubungan dengan efektivitas layanan konseling. Ketika konselor dapat melihat masalah klien dalam konteks budaya yang tepat, mereka lebih mampu memberikan intervensi yang relevan dan bermanfaat. Sebagai contoh, konselor yang memahami perbedaan antara budaya individualistik dan kolektivistik dapat menghindari pendekatan yang terlalu fokus pada solusi individual yang mungkin tidak sesuai dengan budaya klien. Konselor yang memiliki pemahaman budaya yang baik juga lebih terampil dalam menggunakan pendekatan berbasis budaya, seperti memasukkan simbol-simbol budaya atau teknik-teknik lokal dalam sesi konseling, yang pada gilirannya akan meningkatkan keterlibatan klien dalam proses konseling.

Selain itu, konselor yang sensitif terhadap nilai budaya klien dapat membangun hubungan terapeutik yang lebih kuat, karena klien merasa lebih diterima dan dipahami. Misalnya, dalam banyak budaya, termasuk di Indonesia, penghormatan terhadap otoritas atau kesopanan sosial memiliki peran penting. Seorang konselor yang memahami dan menghormati hierarki sosial atau budaya yang ada dalam masyarakat klien akan lebih berhasil dalam menjaga keharmonisan dalam interaksi. Ini sangat penting dalam membangun kepercayaan, yang merupakan fondasi utama dalam proses konseling. Di sisi lain, konselor yang tidak sensitif terhadap budaya klien cenderung membuat kesalahan dalam menafsirkan perilaku atau perasaan klien. Salah satu contoh yang sering terjadi adalah kesalahan dalam menilai perilaku klien yang dianggap terlalu pasif sebagai ketidakmauan untuk berpartisipasi dalam proses konseling, padahal dalam budaya kolektivistik, klien mungkin merasa malu atau ragu untuk berbicara terbuka tanpa adanya dorongan dari orang lain atau tanpa adanya keharmonisan dalam hubungan.

Konselor yang memiliki pemahaman budaya yang kuat akan dapat membantu klien menemukan solusi yang lebih berorientasi pada konteks, mengakui dan menghargai latar belakang budaya mereka dalam proses pemecahan masalah. Sebagai contoh, ketika klien menghadapi masalah yang berkaitan dengan nilai keluarga, seperti konflik antara generasi tua dan muda, seorang konselor yang mengerti nilai kekeluargaan dapat menggunakan pendekatan yang melibatkan seluruh anggota keluarga, mengedepankan dialog, dan menemukan cara-cara yang sesuai dengan budaya klien. Selain itu, pemahaman budaya memungkinkan konselor untuk lebih peka terhadap faktor-faktor psikososial yang dapat mempengaruhi klien, seperti dampak diskriminasi budaya, pengalaman trauma budaya, atau tekanan sosial yang mungkin tidak disadari oleh konselor. Dengan mengintegrasikan aspek-aspek ini dalam intervensi konseling, konselor dapat memberikan dukungan yang lebih komprehensif, sehingga meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan proses konseling.

Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa pemahaman budaya konselor adalah faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan dan efektivitas layanan konseling. Konselor yang tidak mengintegrasikan pemahaman budaya dalam praktik konseling berisiko mengalami kesulitan dalam membangun hubungan terapeutik yang efektif, serta dapat berakhir dengan konseling yang tidak tepat sasaran. Sebaliknya, konselor yang memiliki pemahaman budaya yang mendalam lebih mampu menyesuaikan pendekatannya dengan kebutuhan dan konteks budaya klien, yang pada gilirannya memperkuat hubungan, meningkatkan efektivitas intervensi, dan memastikan kelangsungan layanan konseling yang lebih sukses. (Wulandari et al., 2024) (Chi et al., 2024).

Efektivitas layanan konseling sosial budaya sangat bergantung pada keberhasilan membangun aliansi terapeutik yang kuat antara konselor dan klien. Aliansi terapeutik bukan sekadar hubungan formal antara dua pihak, tetapi merupakan jalinan kepercayaan, empati, dan komitmen bersama untuk mencapai perubahan positif. Dalam konteks budaya yang beragam seperti di Indonesia, aliansi ini tidak dapat dibangun hanya melalui komunikasi verbal atau teknik konseling konvensional, tetapi menuntut keterlibatan aktif dan kepekaan budaya yang mendalam dari pihak konselor. Aliansi terapeutik yang kuat terbentuk ketika klien merasa dipahami secara autentik, bukan hanya sebagai individu, tetapi juga sebagai bagian dari sistem sosial dan budaya yang lebih luas. Untuk mencapai pemahaman seperti ini, konselor dituntut untuk bersikap proaktif, tidak hanya mengandalkan apa yang diungkapkan klien di ruang konseling, tetapi juga dengan melakukan “pengamatan langsung” atau mini-etnografi terhadap lingkungan sosial, budaya, dan keseharian klien. Mini-etnografi ini berarti bahwa konselor berupaya memahami nilai-nilai, kebiasaan, simbol, serta dinamika sosial yang membentuk cara berpikir dan berperilaku klien, baik melalui observasi langsung, wawancara informal, maupun keterlibatan dalam aktivitas sosial di komunitas klien.

Melalui pendekatan ini, konselor dapat melihat realitas kehidupan klien secara lebih utuh, termasuk faktor-faktor budaya yang mungkin menjadi akar dari permasalahan yang dihadapi. Misalnya, dalam masyarakat dengan budaya kolektivistis yang tinggi, keputusan pribadi klien sering kali dipengaruhi oleh pandangan keluarga atau kelompok sosialnya. Tanpa memahami konteks ini, konselor mungkin akan menilai perilaku klien secara keliru atau memberikan saran yang tidak sesuai dengan norma budaya yang berlaku. Dengan melakukan pengamatan langsung, konselor bisa lebih sensitif terhadap nilai-nilai seperti rasa hormat terhadap orang tua, solidaritas komunitas, atau konsep malu dan kehormatan, yang sangat memengaruhi perilaku individu dalam masyarakat Indonesia. Selain memperdalam pemahaman terhadap klien, praktik mini-etnografi juga berfungsi untuk mengurangi bias dan stereotip budaya yang mungkin dimiliki oleh konselor. Dalam interaksi lintas budaya, ada risiko bahwa konselor tanpa sadar membawa asumsi dari budayanya sendiri dan menilainya sebagai standar universal. Melalui keterlibatan langsung di lingkungan klien, konselor belajar melihat realitas sosial dari perspektif klien, bukan dari sudut pandang pribadinya. Pendekatan ini memperkuat empati dan membuka ruang untuk dialog yang lebih sejajar antara konselor dan klien.

Dalam konteks ini, aliansi terapeutik yang dibangun melalui pemahaman budaya yang mendalam berfungsi sebagai jembatan kepercayaan antara konselor dan klien. Kepercayaan ini memungkinkan klien untuk lebih terbuka, jujur, dan aktif dalam proses konseling, karena mereka merasa aman dan dihargai dalam identitas budayanya. Sebaliknya, jika konselor tidak menunjukkan

kepekaan budaya, hubungan terapeutik dapat menjadi kaku, penuh jarak, dan bahkan gagal berfungsi secara efektif. Dengan demikian, efektivitas konseling bukan hanya bergantung pada keterampilan teknis konselor dalam menerapkan teori dan metode, tetapi juga pada kemampuan mereka untuk membangun relasi manusiawi yang berpijak pada empati dan pemahaman lintas budaya. Mini-etnografi dan pengamatan langsung bukan sekadar metode tambahan, melainkan strategi penting untuk memastikan bahwa layanan konseling benar-benar kontekstual, berkeadilan, dan bermakna bagi klien dalam realitas kehidupannya sendiri.(Gea et al., 2024).

Pemahaman budaya adalah penentu utama Aliansi Terapeutik. Aliansi ini terbangun ketika klien merasa dipahami dan diterima secara tulus, yang hanya mungkin terjadi jika konselor menunjukkan empati budaya (Sona, 2016). Untuk mencapai ini, konselor dituntut untuk bersikap proaktif dalam upaya pemahaman. Tidak cukup hanya membaca literatur, tetapi konselor juga harus bersedia "turun" ke lingkungan klien dan melakukan pengamatan langsung untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai norma, bahasa, dan konteks sosial klien (Justitia, n.d.). Sikap proaktif ini menunjukkan rasa hormat dan kesediaan untuk belajar, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan klien dan memperkuat aliansi.

Tabel 1. Sintesis Temuan Kunci Konsep Dasar Konseling Sosial Budaya

No.	Tema Tematik Utama	Konsep Inti	Implikasi Kunci bagi Konselor
1	Paradigma Fundamental (Kekuatan Keempat)	Pergeseran dari praktik netral budaya ke advokatif; wajib secara eksplisit melibatkan variabel budaya klien.	Mengakui variabel budaya sebagai penentu utama dalam mendefinisikan masalah dan merancang intervensi yang etis.
2	Model Standar (Kompetensi Tripartit)	Tiga dimensi: Kesadaran Diri, Pengetahuan Budaya, dan Keterampilan Intervensi	Menguasai standar etis minimal; beroperasi sebagai "pembelajar seumur hidup" untuk klien dan budayanya.
3	Fondasi Absolut (Cultural Awareness)	Refleksi diri untuk mencegah Cultural Encapsulation (bias budaya) dan miskonsepsi nilai	Melakukan Cultural Humility yang berkelanjutan; memahami bagaimana bias pribadi memengaruhi persepsi terhadap klien
4	Kontekstualisasi Lokal	Dominasi nilai Kolektivisme dan Orientasi Vertikal Indonesia; lokalisasi melalui Model Kearifan Lokal (Catur Murti, Gus Dur).	Memodifikasi intervensi (misalnya, melibatkan keluarga/komunitas) dan menyesuaikan teknik sesuai worldview yang holistik.
5	Faktor Keberhasilan	Pemahaman budaya yang mendalam berkorelasi langsung dan signifikan dengan keberhasilan Aliansi Terapeutik.	Bersikap proaktif dalam upaya pemahaman (misalnya, "pengamatan langsung" atau mini-etnografi) untuk menumbuhkan Empati Budaya.

Kesimpulan

Penelitian tinjauan literatur sistematis ini menggarisbawahi temuan terpenting bahwa Konseling Sosial Budaya telah menjadi "kekuatan keempat" yang merupakan imperatif etis wajib di tengah pluralisme Indonesia, di mana standar minimal praktik adalah penguasaan Kompetensi Multibudaya Tripartit (Kesadaran, Pengetahuan, Keterampilan) dengan menjadikan Kesadaran Budaya sebagai fondasi absolut untuk mencegah cultural encapsulation. Selain itu, efektivitas layanan secara signifikan bergantung pada kontekstualisasi teori Barat ke nilai kolektivisme lokal dan integrasi Model Kearifan Lokal (Catur Murti atau Gus Dur) untuk memperkuat Aliansi Terapeutik. Secara keilmuan, penelitian ini memberikan sumbangan berupa kerangka konseptual yang kokoh dan terlokalisasi, yang menjembatani model kompetensi universal dengan model pribumi Indonesia, menyediakan panduan praktik yang definitif, etis, dan responsif budaya. Kesimpulan praktis dari temuan ini menekankan pentingnya bagi konselor untuk mengadopsi sikap proaktif dan kerendahan hati budaya (cultural humility) dalam setiap interaksi untuk menumbuhkan rasa percaya klien. Namun, perlu diakui bahwa keterbatasan utama penelitian ini terletak pada sifatnya yang murni konseptual berdasarkan kajian literatur (SLR) dan tidak melibatkan data empiris langsung dari praktik lapangan, sehingga temuan ini membutuhkan validasi lebih lanjut melalui studi implementasi dan penelitian kualitatif mendalam di lapangan untuk mengukur efikasi model konseling lokal yang diusulkan.

Daftar Pustaka

- Asdaliah, N., & Mahmud, B. (2022). Huruf Jar Ba dan Kandungan Maknanya dalam Q.S. Al-Maidah (The Letter Jar Ba and Its Meaning in Q.S. Al-Maidah). *Loghat Arabi*, 3(1), 68–86. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.36915/la.v3i1.45>
- Chi, Z., Sembiring, N., Yolanda, Y., & Ningsih, R. (2024). Efektifitas Pelaksanaan Konseling Dengan Memahami Perbedaan Budaya. *KHIDMAT: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 58–61.
- Diniaty, A. (2018). MEWASPADAI MISKONSEPSI NILAI BUDAYA DALAM PELAKSANAAN KONSELING INDIVIDUAL. *Educational Guidance and Counseling Development Journal*, 1(1), 6–15.
- El, A., Djovana, F., Habsy, B. A., Purwoko, B., & Nursalim, M. (2023). Konseling Lintas Budaya Gus Dur. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 13(2), 191–213.
- Firjatullah, T. H., & Sa, N. (2025). Konsep Dasar Konseling Catur Murti dalam Konteks Multibudaya. *Fonologi: Jurnal Ilmuan Bahasa and Sastra Inggris*, 3(2), 98–116.
- Gea, A. F., Denisa, & Lalumba, H. (2024). Peran lintas budaya terhadap pendampingan konseling di asrama putri sekolah tinggi teologi ekumene jakarta. *POIMEN: Jurnal Pastora; Konseling*, 5(1), 46–57.
- Gumilang, S. G. (2015). URGENSI KESADARAN BUDAYA KONSELOR DALAM MELAKSANAKAN LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING UNTUK MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA). *Guidena | Jurnal Ilmu Pendidikan, Psikologi, Bimbingan Dan Konseling*, 5(2), 45–58.
- Justitia, D. (n.d.). MEMAHAMI INDIVIDU DALAM KAJIAN LINTAS BUDAYA. 77–89.
- Mulyani, N. S., Mahmuda, I., Prima, N. R., Sintia, B., Studi, P., Keguruan, F., & Jambi, U. (2022). Literature Review : Keberadaan Budaya yang Saling Berkaitan pada Konseling. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 10099–10105.
- Prasetyo, G. (2021). Akulturasi Masyarakat Pandhalungan : Aktualisasi Pendidikan Multikultural Dalam Pembelajaran Sejarah. *Education & Learning*, 1(1), 20–25.

<https://doi.org/10.57251/el.v1i1.16>

- Putri, H., Nadhirah, N. A., & Budiman, N. (2024). CULTURAL AWARENESS : MEMAHAMI SENSITIVITAS MULTIKULTURAL DALAM PRAKTIK KONSELING DI SEKOLAH. *Jurnal Edukasi : Jurnal Bimbingan Konseling*, 10(1), 78–98.
- Putri, S. K. (2020). Penggunaan konseling multikultural dalam meningkatkan efektifitas kerja karyawan. *Prosiding Seminar & Lokakarya Nasional Bimbingan Dan Konseling 2020*, 437–444.
- Qadam, I. U. (2019). Budaya Organisasi Dalam Membentuk Karakter Generasi Khaira Ummah Di Pesantren. *KONSELING EDUKASI "Journal of Guidance and Counseling,"* 3(2), 1–25. <https://doi.org/10.21043/konseling.v3i2.6893>
- Sa'idah, I., & Annajih, H. Z. M. (2024). *KONSEP DASAR BIMBINGAN & KONSELING* (M. Mansyur (ed.); Issue February). Alifba Media.
- Salsabila, U. H., Husna, L. I., Nasekha, D., & Pratiwi, A. (2019). Penggunaan Media Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Bagi Anak Berkebutuhan Khusus. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
- Sona, D. (2016). *Karakteristik Konselor yang Unggul dalam Konseling Lintas Budaya*. 38–42.
- Sutarto. (2022). Membangun Budaya Religius Di Sekolah: Suatu Kajian Terhadap Konsep, Pola, Model, Pendekatan, Metode, Strategi Dan Problematika. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(3), 2801.
- Syahril. (2007). *Konseling Lintas Budaya dalam Perspektif Budaya Indonesia*. 76–86.
- Syamaun, S. (2019). PENGARUH BUDAYA TERHADAP SIKAP DAN PERILAKU KEBERAGAMAAN. *Jurnal At-Taujih Bimbingan Dan Konseling Islam*, 2(2), 85.
- Widodo, A., Rahmad, A., & Rachman, E. S. (2022). Konsep Konseling Lintas Budaya. *AL-IRSYAD: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 4(2), 271–284.
- Wulandari, N., Fadillah, N., Marpaung, N. S., & Pakpahan, G. P. (2024). Implikasi Keragaman Budaya Dalam Praktik Bimbingan Dan Konseling : Studi Kasus Mahasiswa Semester 4 Bimbingan Dan Konseling Universitas Negeri Medan. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 4550–4563.